

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Narendra Modi cenderung menentang hambatan politik yang ada baik di tingkat domestik maupun internasional, dengan melakukan represi pada aktor domestik dan menekankan bahwa permasalahan Kashmir merupakan permasalahan India semata pada tataran internasional dan menghindari dialog resolusi dalam permasalahan ini. Narendra Modi juga tertutup terhadap informasi yang ada sehingga dirinya hanya membingkai permasalahan melalui informasi yang dimiliki tanpa melihat konteks politik yang ada di Kashmir terutama terkait masalah aspirasi dari rakyat Kashmir. Ia juga berfokus terhadap masalah/internal yang kemudian memotivasi dirinya untuk bertindak seperti ideologi Hindu-nasionalisme, citra sebagai seorang *development-oriented*, dan berfokus pada masalah keamanan.

Melalui analisis tersebut didapatkan bahwa Narendra Modi memiliki gaya kepemimpinan *crusader* dan ekspansionis. Bertindak sebagai seorang *crusader* dalam permasalahan ini, Narendra Modi cenderung bersikap memaksakan penggunaan kekuatan dan kekuasaan yang ia miliki tanpa menaruh perhatian lebih dalam konsekuensi-konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut. Bertindak sebagai seorang ekspansionis menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang berfokus pada perluasan kekuasaan dan kekuatannya, melalui pencabutan otonomi Kashmir dapat dilihat bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk memperluas legitimasi atas dasar integrasi Kashmir sebagai wilayah integral India dan atas kontrol penuh dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, Narendra Modi telah bertindak sebagai pemimpin dominan yang berfokus pada tujuan (*goal-*

*driven*) dengan menjadikan tujuannya merupakan hal yang harus diletakkan pada posisi utama dan tidak banyak menaruh perhatian dalam upaya-upaya yang berlandaskan konteks politik dalam kebijakan ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melihat kasus kebijakan pencabutan otonomi Kashmir ini dari sisi kajian berbeda seperti keamanan dan sekuritisasi. Selain kuatnya peran Narendra Modi sebagai pemimpin politik tertinggi di India terkait permasalahan Kashmir yang berujung pada pencabutan otonomi Kashmir, terdapat juga isu-isu keamanan yang menjadi justifikasi Pemerintah India dalam melakukan kebijakan ini seperti berkembangnya narasi mengenai separatisme dan terorisme serta upaya membingkai hal tersebut di berbagai elemen pengambilan kebijakan di India. Selain itu, hambatan yang penulis temukan dalam penelitian ini salah satunya adalah ketersediaan sumber data mengenai pernyataan resmi Narendra Modi dalam permasalahan Kashmir karena banyak yang telah dihapus oleh *website* resmi Pemerintah India.

